

# Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

## Authors:

Asep Hendra<sup>1</sup>, Rivaldi Pradana<sup>2</sup>

## e-Mail:

[asep\\_hendra@ipdn.ac.id](mailto:asep_hendra@ipdn.ac.id), [rivaldiprdn@gmail.com](mailto:rivaldiprdn@gmail.com)

## Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Corresponding author

Asep Hendra

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

[asep\\_hendra@ipdn.ac.id](mailto:asep_hendra@ipdn.ac.id)

Received: June 15, 2023

Revised: June 27, 2023

Accepted: June 29, 2023

Available Online: June 30, 2023

## Abstract

*The Indonesian government issued Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019 as an innovation made to facilitate regional financial management is the Regional Government Information System (SIPD). Following up on this regulation, the Regional Government Information System (SIPD) was started by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bogor Regency in preparing the budget. This study aims to measure the implementation of the local government information system (SIPD) in preparing the budget to improve the quality of local government financial reports in Bogor Regency, West Java Province. The research method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of local government information systems in preparing this budget has not gone well because there are still several obstacles and problems encountered that hinder the implementation process such as lack of socialization, limited knowledge, servers that are difficult to access.*

**Keywords:** Budget Preparation, Implementation, Local Government Information System

## Abstrak

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai inovasi yang dibuat untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menindaklanjuti peraturan tersebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini mulai dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Anggaran, dan Staff Bidang Anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan

anggaran ini belum berjalan dengan baik karena masih adanya beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga menghambat proses pelaksanaannya seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengetahuan, server yang sulit diakses.

Kata Kunci : Implementasi, Penyusunan Anggaran, Sistem informasi Pemerintahan Daerah.

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Khusaini (2018:2) menjelaskan bahwa suatu pengelolaan keuangan daerah merupakan “seluruh kegiatan yang meliputi proses dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan dalam keuangan daerah”. Menurut Baldrick Siregar (2015:11) menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Menurut Baldrick Siregar (2015:11) menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban”.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:48) , anggaran merupakan “ suatu dokumen yang di dalamnya berisi tentang estimasi kerja, penerimaan dan pengeluaran yang akan dicapai pada periode tertentu dan menyediakan data masa lalu dalam rangka pengendalian dan penilaian kinerja”.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa diperlukan suatu inovasi yang dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah yang saling berhubungan satu sama lain untuk menyederhanakan akses antar satu unit ke unit yang lainnya menggunakan satu sistem terpadu. Salah satu pengembangan teknologi informasi yang ada yaitu dengan menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini diatur berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Pengelolaan keuangan pemerintah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah . menurut Suwanda (2019:19) bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan “acuan yang dimiliki oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan,

pemeriksa, yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mencari pemecahan masalah yang belum tersedia dalam pernyataan standar akuntansi”. Menurut Sinurat dkk. (2020:99) “Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan mengajukan laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini merupakan suatu aplikasi yang memuat tentang informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam rangka pengelolaan pembangunan daerah. Menindaklanjuti Permendagri Nomor 70 tahun 2019, maka setiap pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota diharapkan untuk dapat menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dalam pengelolaan keuangan daerah di setiap unit SKPDnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan opini BPK atas hasil Laporan Keuangan yang baik dan akuntabel. Berikut ini disajikan data opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor dari tahun 2015-2021:

**Tabel 1**  
**Penilaian BPK terhadap LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015-2021**

No	Tahun	Opini
1	2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
6	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
7	2021	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor dan diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor. Adapun beberapa kekurangan yang ditemukan dalam laporan

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang tidak baik.
2. Penerimaan retribusi yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah.
3. Pelaksanaan tender pada paket pekerjaan gedung dan bangunan, pekerjaan jalan, irigasi yang tidak sesuai ketentuan.
4. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan diharapkan akan menunjang dan mendorong pelaksanaan sistem informasi dan data pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah nantinya akan menjadi database yang dimiliki oleh daerah untuk menyediakan informasi terkait potensi maupun sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor ini sendiri sudah menetapkan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah memakai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berikut ini data ketersediaan data pemda yang ada di dalam SIPD yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri:

**Tabel 2**  
**Ketersediaan Data Pemda di SIPD tahun 2022**

<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Terintegrasi SIPD</b>	<b>Persentase (%)</b>
Provinsi	34	34	100
Kabupaten	416	379	91,33
Kota	98	87	93,55

Sumber : Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, diolah oleh peneliti 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua pemerintah di Indonesia sudah terintegrasi SIPD, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten dari 416 Kabupaten yang terintegrasi SIPD sejumlah 379 dengan persentase 91,33%, dan pemerintah kota dari 98 kota yang terintegrasi SIPD sejumlah 87 dengan persentase 93,55%. Provinsi Jawa Barat sendiri sudah semua kabupaten kota terintegrasi

dengan SIPD termasuk Kabupaten Bogor.

Sesuai instruksi dari Bupati Bogor pada saat Musrenbang 2022 yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Bogor bahwa Bupati Bogor memerintahkan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bogor untuk dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru yaitu menggunakan SIPD dalam pengelolaan pemerintahannya. Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor yang sudah menerapkan SIPD ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sendiri sudah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dalam proses penganggaran keuangannya. Proses penganggaran keuangan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang terintegrasi menjadi satu sistem pengelolaan keuangan nasional.

Dengan digunakannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini maka akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan transparansi publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, berbagai instansi baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga akan lebih mudah untuk mendapatkan data terkait kondisi keuangan atau data penyusunan anggaran daerah. Banyak manfaat yang diberikan dengan adanya sistem informasi pemerintahan daerah ini. Dimana sebelum penggunaan SIPD, BPKAD melakukan proses penganggaran menggunakan excel atau microsoft access yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyusunannya sehingga dapat mengefektifkan waktu yang ada, selain itu juga data yang dimasukan tidak dapat dipantau atau diperiksa secara langsung oleh pihak yang berwenang.

Implementasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan proses atau suatu cara melakukan pekerjaan untuk diselesaikan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Berdasarkan sudut pandangnya, Implementasi menurut Nugroho (2003:158) Implementasi merupakan suatu konsep yang di dalamnya berisi serangkaian proses, cara dan strategi dalam rangka melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, menurut Edward III sebagaimana yang dikutip di dalam Agustino (2006:149), terdapat 4 variabel yang dapat menentukan kualitas implementasi suatu keputusan,

yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

## **METODE**

Menurut Sugiyono (2018:147) menjelaskan bahwa Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis. Penelitian ini peneliti tekankan pada pemberian gambaran dengan objektif terkait dengan kondisi sebenarnya mengenai implementasi penyusunan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Bogor.

Menurut Mulyadi (2014:1) menyatakan bahwa “Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui suatu fakta secara kritis menggunakan langkah-langkah yang telah ditentukan”.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun penulis mengutip salah satu pendapat Nazir bahwa (2014:346) Analisis Data merupakan proses yang sangat penting di dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebutlah didapatkan makna yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model yang dikemukakan oleh h Miles Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247) , yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan mencatat data yang ada di lapangan secara rinci dan teliti, dipilih dan difokuskan pada halhal pokok yang kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran dengan jelas, serta memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan penyajian data yang telah direduksi oleh peneliti dalam bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh pembaca baik dalam bentuk Tabel, grafik, phie chard, atau lainnya. Dimana dalam penyajian data kualitatif biasanya menggunakan teks dalam bentuk naratif.

### 3. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi

Pengambilan keputusan merupakan tahapan akhir dimana datadata yang sudah

dikumpulkan dan direduksi kemudian ditarik kesimpulan dengan menyertakan bukti-bukti atau dokumen yang mendukung sehingga kesimpulan tersebut dianggap valid dan kredibel.

Ketika melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Adapun metode deskriptif menurut Melly G. Tan di dalam SIlalahi (2012:28) “Penelitian yang di dalamnya menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi dari penyebaran antar gejala atau dengan gejala lain yang ada di dalam masyarakat”.

Teknik Pengumpulan data ini menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dilakukan. Menurut Kristanto (2018:60) yang menjelaskan bahwa suatu “Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian yang berasal dari sumber data”.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data menurut Creswell (2016:253) yaitu “Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara usaha membatasi penelitian, mencari dan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, melakukan dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha untuk menyusun protokol yang digunakan untuk merekam atau mencatat informasi”. Mempermudah peneliti dalam melakukan pengidentifikasian sumber data, maka menurut Arikunto (2013:172) , mengklasifikasikannya menjadi tiga macam yaitu:

1. Person, merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung dimana data yang diberikan berupa lisan melalui proses wawancara atau jawaban tertulis menggunakan angket.
2. Place, merupakan sumber data yang menyajikan tampilan dalam keadaan diam atau bergerak.
3. Paper, merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda dalam bentuk huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol yang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti melakukan penelitian terhadap Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Geoge C. Edward III dalam Agustino (2006:149) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Menurut Edward III, dimensi komunikasi ini dapat diukur oleh tiga indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

##### a. Transmisi

Transmisi (Penyampaian Informasi) merupakan salah satu indikator yang ada di dalam komunikasi yang pertama kali dilakukan. Pegawai atau staf tentunya sebelum melakukan pekerjaan yang mereka miliki harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dilakukan sesuai dengan perintah dan instruksi yang sudah ditetapkan. Dalam proses transmisi ini tentunya jangan sampai adanya distorsi yang terjadi karena akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara program yang dibuat dengan pekerjaan yang dilakukan.

**Gambar 1**  
**Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah**



Sumber : mediajabar.com, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa proses transmisi belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya peran Pemerintah Pusat dalam

penyampaian informasi yang membuat Pemerintah Daerah kebingungan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan salah satu indikator selanjutnya di dalam suatu dimensi komunikasi. Dalam menerapkan penyusunan anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini diperlukan adanya kejelasan yang baik dalam proses komunikasinya. Suatu informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh pegawai. Berdasarakan hasil wawancara dan dokumentasi maka indikator kejelasan sudah dijalankan dengan baik, karena proses sosialisasi yang menyeluruh serta tersedianya sarana pengaduan ketika terjadi hambatan atau tantangan yang muncul

c. Konsisten

Indikator selanjutnya yang ada di dalam dimensi komunikasi adalah konsistensi. Konsistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tetap atau tidak berubah-ubah, taat asas atau ajek, selaras dan sesuai. Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan anggaran ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Bogor pada tahun 2020, dimana sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan anggaran ini tetap dilaksanakan secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini sudah cukup konsisten sejak diinstruksikan tahun 2019 dan dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Kabupaten Bogor sampai dengan saat ini. Akan tetapi, SIPD ini belum mampu untuk memenuhi pelaksanaan di penatausahaan.

2) Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu faktor keberhasilan dari suatu implementasi. Meskipun implementasi ini sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten, tetapi implementor atau orang yang melaksanakan implementasi tersebut juga hal yang penting untuk diperhatikan.

a. Staf

Staf atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan sangat mempengaruhi jalannya implementasi. Sehingga memilih staf yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting di dalam organisasi.

**Tabel 3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	32
2	Strata 1	44
3	Diploma 4	1
4	Diploma 3	1
5	SMA	13
6	SLTP	1
<b>Jumlah</b>		92

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

b. Informasi

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi sumber daya adalah informasi. Proses informasi yang baik diperlukan agar koordinasi yang dilakukan berjalan dengan sukses. Dalam hal ini proses informasi terkait dengan penyusunan anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah dapat dijalankan dengan baik atau sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan yaitu proses penyampaian informasi baik kepada staf maupun SKPD lain yang ada di Kabupaten Bogor ini sudah cukup baik untuk dilaksanakan, mulai dari pemberian surat edaran, melakukan pelatihan dan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan mengundang pemerintah pusat.

c. Wewenang

Analisis terhadap beberapa hasil wawancara yang peneliti dapatkan yaitu proses penyampaian informasi baik kepada staf maupun SKPD lain yang ada di Kabupaten Bogor ini sudah cukup baik untuk dilaksanakan, mulai dari pemberian surat edaran, melakukan pelatihan dan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan mengundang pemerintah pusat. Berdasarkan analisis yang peneliti dapatkan dari wawancara dan

dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa indikator wewenang ini sudah berjalan dengan baik, karena para pegawai sudah paham terkait dengan wewenang yang dimilikinya selain itu secara otomatis SIPD juga sudah membatasi masing-masing individu untuk menjalankan kewenangannya.

d. Fasilitas

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi dimensi sumber daya adalah fasilitas. Apabila proses pelaksanaan ingin berjalan dengan lancar maka diperlukan adanya suatu fasilitas fisik di dalam organisasi. Melalui fasilitas ini menjadi faktor penunjang dalam pelaksanaan penyusunan anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD). Apabila di dalam pelaksanaan ini sudah memiliki SDM yang kompeten tetapi tidak memiliki fasilitas yang cukup maka dapat menyebabkan suatu kegagalan.

**Tabel 4**  
**Konsisi sarana dan PRasarana BPKAD**

No	Uraian	Volume	Kondisi
1	Komputer PC	130 Unit	Baik
2	Komputer Notebook	48 Unit	Baik
3	Printer	79 Unit	Baik

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa indikator fasilitas sudah cukup baik dikarenakan sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap. Akan tetapi, sarana dan prasarana yang lengkap juga akan terhambat karena server yang sering kali sibuk sehingga proses penginputan berjalan sangat lama.

3) Disposisi

Dimensi selanjutnya yang mempengaruhi implementasi adalah disposisi. Disposisi merupakan suatu perintah secara tertulis dari kegiatan yang dilakukan atas naskah atau surat. Indikator yang ada di dalam sebuah disposisi adalah indikator pengangkatan birokrasi dan juga insentif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam organisasi karena proses ini akan menentukan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Apabila indikator pengangkatan birokrat ini tidak

terlaksana dengan maksimal maka akan membuat tugas dan fungsi yang ada tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari hasil wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan birokrasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik karena seluruh proses pengangkatan birokrasi dijalankan berdasarkan peraturan dan regulasi yang ada.

b. Insentif

Indikator selanjutnya yang dapat mempengaruhi dimensi disposisi adalah insentif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kinerja pegawai adalah dengan insentif pegawai. Insentif pegawai ini dapat dilakukan dengan memberikan penambahan pendapatan atau keuntungan yang lainnya kepada pegawai. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa indikator insentif belum dilaksanakan dengan maksimal karena para pelaksana penyusunan anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini tidak mendapatkan penghasilan tambahan atau penghargaan lebih atas kemampuan yang dimilikinya.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu bentuk sarana yang digunakan oleh sekelompok orang untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Meskipun sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi ini tersedia, staf atau pelaksana mengetahui dan memahami pekerjaan yang mesti dilakukan, akan tetapi struktur birokrasi memiliki peran penting di dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan ini.

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu indikator didalam struktur birokrasi yang penting dalam dimensi struktur birokrasi. Standar operasional prosedur merupakan pedoman tertulis yang digunakan oleh organisasi untuk mendorong dan menggerakkan program tersebut akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait indikator Standar Operasional Prosedur di atas BPKAD belum mampu melaksanakannya dengan maksimal, hal ini dikarenakan pada tahun 2022

terjadi suatu keterlambatan dalam menutup aplikasi SIPD dikarenakan Kabupaten Bogor baru mendapatkan Hasil Penyempurnaan Evaluasi dari Gubernur pada tanggal 30 Desember 2022, dan server SIPD ini juga yang terkadang sulit untuk diakses karena dalam waktu yang bersamaan seluruh Pemerintahan Kabupaten atau Kota lainpun membuka SIPD.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah salah satu indikator yang dapat mempengaruhi dimensi struktur birokrasi. Suatu organisasi harus mampu untuk membagi atau menyebarkan tanggung jawab kepada beberapa badan atau kepada pegawai di dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa dimensi Struktur Birokrasi ini belum dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan terjadinya keterlambatan menutup aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2022, serta server Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sulit diakses ketika diakses dalam waktu yang bersamaan sehingga belum terpenuhinya indikator Standar Operasional Prosedur yang baik.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Anggaran untuk Meningkatkan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, maka peneliti dapat menyimpulkan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Anggaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat belum maksimal karena masih banyaknya kendala atau permasalahan dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah Kurangnya sosialisasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran oleh pemerintahan pusat, Keterbatasan pengetahuan para pelaksana penyusunan anggaran menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Tidak adanya penghasilan tambahan atau insentif bagi pelaksana

penyusunan anggaran menggunakan sistem informasi 102 pemerintahan daerah dan Kesulitan mengakses server Sistem Informasi Pemerintahan Daerah saat proses penyusunan anggaran dimulai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, J. 2016. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, and Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Khusaini, Moh. 2018. Keuangan Daerah. Malang: UB Press.

Kristanto, and Hery Vigih. 2018. Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yogyakarta: Deepublish.

Mulyadi, Muhammad. 2014. Metode Penelitian Praktis; Kuantitatif Dan Kualitatif. Jakarta: Pilar Institute.

Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Sinurat, Marja, Royadi, and Tumpak Haposan Simanjuntak. 2020. Cara Cerdas Dan Mahir 456 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Pustaka Rahmat.

Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. CV Alfabet. Bandung.

Suwanda, Dadang. 2019. Sistem Akuntansi Akrua Pemerintahan Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrua. Jakarta: Gramedia.